

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hipotesis yang diajukan yaitu “Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling di Kota Bandung (Studi mengenai Pelayanan Akte Kelahiran) ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik dalam menentukan besar dan arah hubungan (korelasi) diantara dua variabel tersebut terdapat hubungan sebesar 50,3% dan sisanya sebesar 49,7% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti faktor pengendalian dan pengawasan, sekaligus membuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesis diterima dan teruji secara empirik

5.2. S a r a n

5.2.1. Saran Akademis

Dimensi-dimensi dari variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Ijin Pengelolaan Tempat Parkir di BPPT Kota Bandung memiliki kelemahan, hal ini disebabkan oleh kurangnya penyampaian Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang digunakan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemohon Akte Kelahiran, perlu ditingkatkan intensitas pendekatan dan analisis yang mendalam untuk melakukan komunikasi yang efektif, penggunaan sumberdaya yang optimal, sikap pelaksana kebijakan yang profesional dan struktur birokrasi yang baik.

5.2.2. Saran Praktis

1. Aparat Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung khususnya yang melayani Akte Kelahiran hendaknya dalam melakukan komunikasi lebih dioptimalkan dengan membuat brosur atau pamflet yang dapat diketahui oleh masyarakat pemohon akte kelahiran.
2. Untuk lebih mengoptimalkan Sumber Daya dalam melaksanakan kebijakan hendaknya Aparat Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung khususnya yang melayani Akte Kelahiran dapat meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia, Skill (keterampilan) pegawai, Biaya yang diperlukan, Peralatan yang disediakan, dan sarana dan prasarana pendukung dengan menambah kendaraan keliling untuk memberikan pelayanan yang optimal.
3. Untuk mendukung Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara efektif dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan hendaknya petugas pelayanan keliling dapat meningkatkan sikap para

pelaksana (pegawai) dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal.

4. Aparat Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan akte kelahiran agar memperhatikan tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

[Pindahkan ke sini](#)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : ” Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi mengenai Pelayanan Akte Kelahiran)”.

Dalam penelitian ini peneliti menguji hipotesis berdasarkan faktor-faktor implementasi kebijakan mengacu pada pendapat Edward III dalam Winarno (2008 : 210) yang meliputi (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi/ Sikap Pelaksana (4) Struktur Birokrasi.

Berdasarkan teori-teori dalam kerangka penelitian, dapat merumuskan hipotesis “Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Studi mengenai Pelayanan Akte Kelahiran) ditentukan oleh “ Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Eksplanatori Researcht*. Sumber dan teknik pengumpulan data adalah sumber data primer dan data sekunder sedangkan pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui observasi, wawancara dan angket.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan searah antara variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Variabel Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis teruji secara empirik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MANGGA BAHASA INGGRIS KEUN